

PENGARUH PENGANGGARAN, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Survei Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah)

Nini Sabaria, Chalarce Totanan, Jamaluddin

nini.sabaria@yahoo.com

Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims at examining and analyzing The Effect of Budgeting, Transparency of Public Policy and Public Accountability on Regional Financial Supervision (Survey at The Office of The People's Representative council in Central Sulawesi Province), either simultaneously or partially. The method used is saturated or census sampling. The respondents of this study amounted to 39 members of the people's representative council in the province of central Sulawesi who were sampled. The technique of Data collection was survey technique by distributing questionnaires. The analytical toll used is multiple linear regression analysis with the help of Statistical Package for Social Science (SPSS). The results of this study indicate that the Budgeting, Transparency of Public Policy and Public Accountability on Regional Financial Supervision simultaneously contributes positive and significant influence Regional Financial Supervision. While partially Budgeting, Transparency of Public Policy and Public Accountability excccution contributes positive and significant influence Regional Financial Supervision at The Office of The People's Representative council in Central Sulawesi Province.

Keywords: *Budgeting, Transparency of Public Policy, Public Accountability and Regional Financial Supervision.*

PENDAHULUAN

Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun masyarakat juga perlu mengawasi keuangan daerah untuk memastikan tidak ada penyelewengan anggaran oleh pejabat di pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diatur dalam Keppres No. 74 Tahun 2001. Pengawasan ini dimaksudkan agar pemerintah tetap konsisten mengelola keuangan daerah sebagaimana yang telah disepakati dalam perda APBD (Samsul, 2006:74).

Pengawasan APBD yang dilakukan lembaga legislatif (DPRD) bukan hanya dalam proses pelaksanaan dan pelaporan saja tetapi dimulai dari proses perencanaan penganggaran. Dalam hal ini tahap perancangan anggaran

sangat kritis pada sisi pengawasan sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih dari DPRD. Karena saat ini kurang lebih banyak anggota legislatif yang divonis bersalah dalam hal menyalahgunakan APBD yang dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini berfokus untuk menemukan bukti empiris terkait pengaruh penganggaran, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah.

Teori Keagenan

Permasalahan keagenan dalam pemerintahan antara lain adalah dalam konteks pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran, oportunitas agen dapat berupa rent seeking ataupun korupsi. Apabila aktivitas tersebut dilaksanakan selama proses

pengalokasian sumberdaya maka keputusan yang mendominasi adalah keputusan politik, bukan ekonomi atau administratif, sehingga disebut korupsi politis (*political corruption*) dan ketika dilakukan setelah anggaran ditetapkan atau saat anggaran dilaksanakan, maka keputusan ekonomi atau administratif lebih dominan daripada keputusan politik sehingga oportunitas disebut korupsi administratif (*administrative corruption*) (Asmara, 2010). Teori keagenan, dapat dinyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terhadap anggaran yang dilaksanakan oleh eksekutif merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi adanya asimetri informasi atau mengurangi ketidakpastian. Pengawasan diperlukan untuk mengukur dan memprediksi tujuan serta peluang untuk melakukan intervensi terhadap aktivitas yang sesuai dengan yang diharapkan (Mayasari, 2012).

Penganggaran, Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Penganggaran erat kaitannya dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Transparansi kebijakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, informasi perlu dapat diakses oleh orang-orang yang berkepentingan dan informasi tersebut harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh orang-orang yang membutuhkan informasi. Pengertian tersebut sejalan dengan UU No.14

Tahun 2008 bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format yang sesuai.

Akuntabilitas publik dapat tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas publik mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan. (Pramita dan Lilik, 2010). Secara umum, pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2002:146), pengertian pengawasan APBD dirumuskan sebagai berikut, pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah. Pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.

H1: Penganggaran, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)

Penganggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pengetahuan Dewan, dalam penelitian Wiyana (2011) kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Pengetahuan sebagai kepandaian

yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai wakil rakyat.

H2: Penganggaran berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Transparansi Kebijakan Publik, dalam penelitian Utami dan Syofyan (2013), transparansi adalah keterbukaan dalam proses penganggaran, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama karena menyangkut semua aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Hal ini tergambar dalam hasil penelitian yang dilakukan Coryanata (2007), Sudiarta at all. (2014). Sehingga transparansi kebijakan publik sangat berhubungan dengan pengawasan keuangan daerah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Yulinda (2010) mengatakan Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

H3: Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan agensi muncul antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai principal dan publik/warga berlaku sebagai principal yang memberikan otoritas kepada DPRD (agen) untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas publik menjadi suatu konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan prinsipal.

Akuntabilitas publik dapat tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Hal ini juga didukung oleh pendapatnya Robbins (1996) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Sehingga akuntabilitas publik yang tinggi akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan.

METODE

Jenis penelitian ini yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. populasi dalam penelitian ini adalah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam menggunakan *sampling* jenuh atau sensus. Responden dalam penelitian ini adalah Keseluruhan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang berjumlah 41 orang.

Operasional Variabel

1. Variabel Penganggaran terdiri 3 dimensi yaitu Perencanaan, Pengendalian dan Alat Politik, Mardiasmo (2009).
2. Variabel Transparansi Kebijakan Publik terdiri dari 4 dimensi yaitu Pengumuman Kebijakan Anggaran, Tersedia LPJ tepat waktu, terakomodasi usulan rakyat dan pemberian informasi kepada publik, Sopanah dan Mardiasmo (2003).

3. Variabel Akuntabilitas Publik terdiri dari 3 dimensi yaitu Jujur, Objektif dan Transparan, Pusdiklatwas BPKP (2007).
4. Variabel Pengawasan Keuangan Daerah terdiri dari 3 dimensi yaitu Pengawasan Pelaksanaan Perda, Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Memantau Pelaksanaan APBD, (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Keppres Nomor 74 Tahun 2001).

Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda. Model persamaan regresi adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pengawasan Keuangan Daerah
 X_1 = Penganggaran
 X_2 = Transparansi Kebijakan Publik
 X_3 = Akuntabilitas Publik
 α = Konstanta
 $\beta_1 X_1, \beta_2 X_2, \beta_3 X_3$ = Koefisien Regresi
 e = Error/ variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat uji statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda sebelum dilakukan pengujian secara statistik keseluruhan data yang diperoleh dari hasil tabulasi jawaban kuesioner diklasifikasikan kedalam skor interval, dikarenakan skala data yang digunakan merupakan data ordinal maka terlebih dahulu hasil pengukuran skala ordinal ditransformasikan kedalam bentuk skala interval dengan *Method of Successive Interval* (MSI) dengan bantuan Ms. Excel 2007 dan succ97.

Hasil persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = 2,141 + 0,359X_1 + 0,316X_2 + 0,313X_3 + e$$

Persamaan regresi tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen. Koefisien X_1 (penganggaran), X_2 (transparansi kebijakan publik), dan X_3 (akuntabilitas publik) memiliki arah pengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu pengawasan keuangan daerah (Y). Hasil perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai constanta sebesar 2,141 berarti pengawasan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah sebelum adanya variabel independen (penganggaran, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik) adalah sebesar 2,141.
2. Setiap terjadi peningkatan dalam penganggaran, akan berpengaruh pada peningkatan pengawasan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Penganggaran dengan nilai koefisien regresi adalah 0,359 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara penganggaran dan pengawasan keuangan daerah. Semakin baik dalam penganggaran maka semakin meningkat pengawasan keuangan daerah.
3. Setiap terjadi peningkatan dalam transparansi kebijakan publik, akan berpengaruh pada peningkatan pengawasan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Transparansi kebijakan publik dengan nilai koefisien regresi adalah 0,316 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah. Artinya semakin baik transparansi kebijakan publik maka semakin baik pula dalam pengawasan keuangan daerah.
4. Setiap terjadi peningkatan dalam akuntabilitas publik, akan berpengaruh pada peningkatan pengawasan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Akuntabilitas publik dengan nilai koefisien regresi adalah 0,313 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara akuntabilitas publik dan pengawasan keuangan daerah. Artinya semakin baik

akuntabilitas publik maka semakin baik pula dalam pengawasan keuangan daerah.

Nilai Adjusted R square (R^2) diperoleh sebesar 0,361. Nilai tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat dikatakan bahwa secara simultan (keseluruhan) pengaruh variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3) terhadap variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah sebesar 36,1% atau dapat pula diartikan bahwa 36,1% variasi dari variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi dari masing-masing variabel independennya (X_1 , X_2 , dan X_3). Sedangkan, sisanya sebesar 63,9% dijelaskan oleh pengaruh dari variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dugaan penelitian atau hipotesis. Adapun hasil pengujian hipotesis penelitian ini sebagai berikut.

1. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen (X) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan hasil uji ANOVA (*Analysis of Variance*) atau F test diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 8,143 > F_{tabel} sebesar 2,87 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% ($0,000 < 0,05$). Pengaruh secara simultan yang dihasilkan bertanda positif, artinya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis pertama diterima.
2. Hasil uji t di peroleh nilai t_{hitung} penganggaran lebih besar dari t_{tabel} ($2,707 > 2,030$) dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% ($0,010 < 0,05$). Pengaruh penganggaran yang dihasilkan bertanda positif, artinya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian nilai ini memberikan makna bahwa variabel penganggaran (X_1) berpengaruh

signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis kedua diterima.

3. Hasil uji t di peroleh nilai t_{hitung} transparansi kebijakan publik lebih besar dari t_{tabel} ($2,415 > 2,030$) dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% ($0,021 < 0,05$). Pengaruh transparansi kebijakan publik yang dihasilkan bertanda positif, artinya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian nilai ini memberikan makna bahwa variabel transparansi kebijakan publik (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). diterima.
4. Hasil uji t di peroleh nilai t_{hitung} akuntabilitas publik lebih besar dari t_{tabel} ($2,368 > 2,030$) dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% ($0,024 < 0,05$). Pengaruh akuntabilitas publik yang dihasilkan bertanda positif, artinya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian nilai ini memberikan makna bahwa variabel akuntabilitas publik (X_3) berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). diterima.

1. Pengaruh Penganggaran, Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

Hasil uji statistik yang dilakukan, dinyatakan bahwa hipotesis penganggaran, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (hipotesis 1) diterima. Hasil pengujian tersebut dapat diterima karena meningkatnya pengawasan keuangan daerah yang tinggi sangat dipengaruhi oleh penganggaran, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik yang baik.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penganggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD, artinya semakin baik

penyusunan dan pengendalian dalam penganggaran, akan semakin baik pula DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap APBD, dengan adanya perencanaan atau persiapan dalam penyusunan anggaran yang baik maka akan memperbaiki pelaksanaan anggaran, baik dalam proses penatausahaan anggaran maupun dalam laporan, serta program dan kegiatan yang menjadi sasaran dan tujuan akan tercapai dengan baik, begitupun dengan adanya pengendalian anggaran yang baik maka perencanaan anggaran akan semakin baik dan penyelenggaraan pemerintah dapat mencapai hasil yang semakin baik pula, dan adanya politik penganggaran berdampak baik dalam penyusunan penganggaran karena dapat mengakomodir program atau kegiatan yang belum terakomodir di KUA-PPAS, sehingga akan bermanfaat pada kepentingan masyarakat, karena outputnya benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Dengan demikian dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan APBD, perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas peran serta masyarakat. Transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik merupakan kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah, karena dalam transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

2. Pengaruh Penganggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

Hasil uji statistik yang dilakukan, dinyatakan bahwa hipotesis penganggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (hipotesis 2) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik perencanaan penganggaran yang dilakukan anggota DPRD, maka akan semakin baik pula pengawasan keuangan daerah. Penganggaran yang baik akan bermanfaat pada kepentingan masyarakat, karena outputnya benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan

daerah sejalan dengan hasil penelitian Amiruddin (2006). Penelitian ini sejalan dengan pendapat Amiruddin (2006) yang menyatakan bahwa peran legislatif dalam penganggaran sangat menentukan pengawasan keuangan daerah oleh anggota dewan, dan peran utama legislatif dalam proses politik penyusunan anggaran terlihat jelas saat pembahasan KUA-PPAS serta dalam penetapan perda APBD.

3. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan, dinyatakan bahwa hipotesis transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (hipotesis 3) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi kebijakan publik yang diinformasikan kepada publik maka pengawasan keuangan daerah akan semakin meningkat dengan baik. Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah sejalan dengan hasil penelitian Utami dan Syofyan (2013) dan Coryanata Isma (2012).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Utami Syofyan (2013) dan Coryanata Isma (2012), yang mengemukakan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi transparansi harus mengandung keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Kemajuan informasi dan teknologi telah mendorong berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi untuk lebih mendorong pemerintahan yang transparan.

Mardiasmo (2003) menyebutkan Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif

dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; (4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat; dan (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Jadi, semakin transparan kebijakan publik yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

4. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil uji statistik yang dilakukan, dinyatakan bahwa hipotesis akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (hipotesis 4) diterima. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi akuntabilitas publik maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah yang dihasilkan oleh anggota DPRD. Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah sejalan dengan hasil penelitian Pramita dan Lilik (2010), Coryanata (2007) dan Devi (2010).

Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pramita dan Lilik (2010) bahwa anggota dewan harus dapat mempertanggungjawabkan dalam hal menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan yaitu salah satunya aktifitas pengawasan keuangan daerah. Dengan ini, dewan dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu dalam menggunakan anggaran dengan baik karena masyarakat memiliki hak dan kewenangannya atas pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian semakin tinggi akuntabilitas publik maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa akuntabilitas publik

berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 20). Dengan diterapkannya akuntabilitas publik, maka akan memotivasi anggota dewan untuk meningkatkan pengawasan keuangan daerah, disamping itu akuntabilitas publik juga memberikan peran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui proses dan hasil dari pengawasan sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawasan keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penganggaran, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas publik secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik Penganggaran, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas publik yang dilakukan oleh anggota dewan maka dapat meningkatkan tingkat pengawasan keuangan daerah.
2. Penganggaran secara parsial berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya penganggaran yang baik maka dapat meningkatkan tingkat pengawasan keuangan daerah.
3. Transparansi kebijakan publik secara parsial berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya transparansi kebijakan publik maka akan

meningkatkan pengawasan keuangan daerah.

4. Akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan. Dengan adanya akuntabilitas publik yang baik maka dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah.

Rekomendasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi anggota dewan dan Pemerintah Daerah dalam memutuskan program/kegiatan sebaiknya lebih memprioritaskan kepentingan rakyat, sehingga tidak salah menentukan program/kegiatan, pengumuman kebijakan anggaran harus terbuka kepada masyarakat dalam perumusan anggaran dan dalam menyampaikan LPJ harus tepat waktu untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk meningkatkan pengawasan keuangan daerah, anggota dewan perlu melakukan bimbingan teknis terkait mekanisme penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sehingga dapat memahami dengan baik bahwa LAKIP merupakan alat pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam peningkatan pengawasan keuangan daerah.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah serta kinerja pemerintah daerah agar bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan dan menggunakan variabel lain, seperti partisipasi masyarakat, kualitas anggota dewan, personal background, political background, dan komitmen organisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mohammad Iqbal B, Bapak Fadli Moh. Saleh dan Ibu Nurhayati selaku Tim Penguji yang telah bersedia menyumbangkan

pemikirannya dalam bentuk saran demi kesempurnaan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Asmara. 2006. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah*. Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Palembang.
- Abdullah, Syukriy. 2009. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Oktober 13, 2009.
- Achmadi, Adib. 2005. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta. Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Alamsyah. 1997. *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*. Tesis. Program Magister Akuntansi Publik. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Amin Widjaja Tunggal. 2008. *Dasar-dasar Customer Relationship Management (CRM)*. Jakarta: Harvindo.
- Andriani, R. 2002. *Pengaruh Pengetahuan dan RPPS terhadap peran DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi kasus pada DPRD seprovinsi Bengkulu)*. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Asmara, Abdullah. 2006. *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Paper disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang-26 Agustus 2006. K-ASPP 01.
- Asmara, Jhon Andra. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol 3. No. 2. Juli 2010. Hal 155-172.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating

- Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Darma, Jufri. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah*, Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa.
- Darma, Jufri dan Ali Fikri Hasibuan. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Mediasi* Vol. 4 No. 1.
- Dewa, Gede Sudiarta, Ni Luh Gede Sulindawani dan Edy Sujana. 2014. Analisis Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi* Vol. 2 No. 1.
- Elsi, Arianti, 2017. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Political Background, Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderasi. *JOM FEKON* Vol. 4 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Fifit, Purnama dan Nadirsyah, 2016. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, Vol.1 No. 2 Hal. 01-15.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah*.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bulak Sumur: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Indradi dan Syamsiar, 2001. Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPRD dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang.
- Iskandar. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan dengan Transparansi Publik Sebagai Variabel Moderating Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*.
- Istijanto, 2006. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jensen, Michael C., William H. Meckling, 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, *The Journal of Financial Economics*.
- Julitriarsa dan Suprihanto, 1998. *Manajemen Umum* (Sebuah Pengantar). Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Juliastuti, 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2, Padang.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah Di Republik Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manginte Yunus Shofia, Sukoharsono Ganis Eko dan Saraswati Erwin. 2015. *Pengetahuan Anggaran Serta Peran*

- Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Budaya Politik Terhadap Pegawai Keuangan Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura). SNA XVIII*
- Mardiasmo. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. Yogyakarta: penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi keempat. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance*. Bahan paparan pada Seminar Nasional Akuntansi Sektor Publik yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 13 Maret 2010.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mayasari, Rosalina Pebrica, 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintah Yang Baik Sebagai Variabel Moderating. *Jenius* Vol.2 No.1.
- Mulgan, Richard. 1997. The Process of public accountability. *Australian Journal of Public Administration* 56 (1) March, pp. 26-36.
- Nico, Andrianto. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Edisi Pertama. Palangka Raya: penerbit Bayumedia.
- Palupi, Nimas A. 2012. Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat sebagai Moderasi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. *Accounting Analysis Journal (AAJ)* 1 (2).
- Pangesti, Iga Agustina. 2013. *Analisis Pengetahuan Dewan Tentang Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Menggunakan Variabel Moderating*. *AJJ* 2(1)
- Pramita, Yulinda Devi dan Lilik Andriyani, 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)*. Universitas Muhammadiyah Magelang, SNA XII
- Pramita, Yulinda D dan Andriyani. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman. (Online), (<http://asp.trunojoyo.ac.id>, diakses 1 November 2015).
- Pramono, A.H. 2002. *Pengawasan Legislatif terhadap ksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Tesis S2 tidak dipublikasikan. Malang : Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya.
- Purnomo. 2016. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)*. *JOM FEKON* Vol. 3 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Pusdiklatwas BPKP.go.id. 2007. *Sinergi LAKIP-LPJ Bagi Perwujudan Akuntabilitas*.
- Ramang, dan Andriana, 2016. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan APBD dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*. Artikel Ilmiah, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Rinusu dan Mastuti. 2003. *Panduan Praktis Mengontrol APBD*. Jakarta: Civic Education and Budget Transparency Advocation (CiBa) dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES).

- Ritonga, Irwan Taufiq dan Ehrmann Suhartono. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Satu. Yogyakarta: LKMPD.
- Robert J. Mockler Dama Kaho, 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Robbins, Stephen. 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi Alih Bahasa*. Hedyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Rosalina, Peblica. 2012 “Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik Sebagai Variabel Moderating”. *Jenius*. Vol 2 Jan 2012.
- Rosseptalia, Rima. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Samsul, Mohamad. 2006. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Jakarta: Erlangga.
- Simson, Werimon. 2005. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang (tidak dipublikasikan).
- Sopannah, 2003. Pengaruh Partisipasi dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal SNA VI*. Hlm. 1160-1174.
- Sopannah dan Mardiasmo, 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
- Sopannah & Wahyudi, Isa. 2007. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Sudarmato. 2014. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Cetakan Kedua. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Cetakan Ketujuh. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Edisi Ke-10. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2009. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta : Edisi Pertama. Media Pressindo.
- Setyawati. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderasi*. Tesis. Surakarta.
- Ulan, Sari, Dwiva. 2014. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Utami dan Syofyan. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal Wra*. Vol. 1 No. 1, Padang.
- Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Cetakan ketiga. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

- Wawo dan Sarufa. 2017. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Kendari : Universitas Halu Oleo.
- Werimon, Simson, Ghazali, Imam dan Nazir, Mohamad. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Study Empiris di Provinsi Papua. Simposium Nasional Akuntansi X. Papua.
- Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2006. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Surakarta : Universitas sebelas Maret.
- Wiyana, Adi Priya. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Yudono, B. 2002. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (online). (<http://www.bangda.depdagri.go.id>, diakses 18 September 2013).
- Yudono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah*, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Yuniarsih, Tjutju., Suwatno. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Cetakan Ketiga. CV. Alfabeta.
- Peraturan Perundang-undangan :
 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO Page 27
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.